

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

Iflaha Takaria

Iflahatakaria@gmail.com

Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to find out: 1) to find out and to analyze how the optimization the local own source revenue in supporting the development of Surabaya city, 2) to find out and to analyze the problems which support and inhibit Local Own source revenue of Surabaya city. The research method has been done by using qualitative research, meanwhile the analysis technique data has been done by using descriptive analysis with qualitative approach. It can be concluded from the result of the research that: 1) In 2013-2015 periods, the realization of local own source revenues which has been generated by the Department of Revenue and Financial Management to meet the budget. The enhancement of 2013-2015 local own source revenues cannot be separated from the efforts of the local government of Surabaya to support the implementation of local autonomy in which the implementation has been conducted by using intensification and extensification. 2) the supporting factors to optimize the local own source revenue i.e.: the officers should conduct the collection to the Delinquent taxpayer (pick up the ball system). Give warning letter to the delinquent taxpayers. To provide information through the ease of paying taxes to the nearest UPTD. To increase the socialization activity to the public. 3) The inhibiting factors with the optimization of local own source revenue i.e.: the lack of knowledge of the public about the payment procedure. The department has not been able to determine the punishment yet. 4) The level of development Surabaya city can be stated quite well, because the local own source revenue has been obtained more than the budget which has been determined.

Keywords: optimization, local own source revenue, local development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan Kota Surabaya, 2) Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam mendukung dan menghambat Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Selama tahun 2013-2015 realisasi PAD yang dihasilkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan memenuhi anggaran. Adanya peningkatan realisasi PAD 2013-2015 tidak terlepas dari usaha Pemkot Surabaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, 2) Faktor-faktor pendukung optimalisasi PAD adalah: Petugas melakukan penagihan terhadap penunggak pajak (Sistem jemput bola). Memberikan surat peringatan terhadap penunggak wajib pajak. Memberikan informasi kemudahan pembayaran pajak melalui UPTD terdekat. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. 3) Faktor-faktor penghambat dengan optimalisasi PAD adalah: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran. Belum mampu menetapkan sanksi. 4) Tingkatan Pembangunan Kota Surabaya dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena PAD yang dihasilkan selalu melebihi anggaran yang ditetapkan.

Kata Kunci : optimalisasi, pendapatan asli daerah, pembangunan daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Salah satu bentuk apresiasi pemerintah saat ini adalah kehadiran UU No. 32 tahun 2004 yang telah di perbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan pijakan yang kokoh bagi proses otonomi dan pemberdayaan di daerah, termasuk dalam keleluasaan pengelolaan kewenangan bidang keuangan dan pendapatan daerah.

Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 dan UU No 33 tahun 2004 telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai hubungan antara pusat dan daerah khususnya dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berusaha meningkatkan perekonomian dan sosial rakyatnya, pembangunan didaerah dari berbagai potensi, dan memenuhi kebutuhan aspirasi masyarakatnya. Semuanya akan terwujud jika diimbangi dengan dukungan dari segi keuangan daerah yang cukup dan pengelolaan yang baik. Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah didaerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Salah satu penerimaan/pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (Darmanto, 2016). Pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah tersebut harus dibarengi dengan persiapan daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Indonesia masih mempunyai potensi alam dan seni budaya yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan PAD. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di miliknya. Berkaitan dengan hal tersebut optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2010:146) mengemukakan bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di dalam perkembangan selanjutnya, diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan PAD. Identifikasi pajak perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui prinsip keadilan, demi tercapainya kemakmuran masyarakat di daerah itu sendiri. Dengan prinsip tersebut paradigma negatif mengenai pelaksanaan otonomi daerah, bahwa masyarakat adalah beban pembangunan, dapat diminimalisir. Pandangan bahwa masyarakat adalah obyek pembangunan harus diubah menjadi subyek utama pembangunan daerah. Pada era

desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin penting. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Kemandirian yang tinggi akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional maupun internasional yang pada akhirnya mempengaruhi besar-kecilnya penerimaan bantuan dari pusat (Wardhono, *et al.* 2012).

Kota Surabaya sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Surabaya itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Surabaya berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan Kota Surabaya?, 2) Kendala-kendala apa saja yang mendukung dan penghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan Kota Surabaya, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam mendukung dan penghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

TINJAUAN TEORETIS

Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2008:800) optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Gibson, *et al.* (2004:701) menyatakan bahwa optimalisasi (*optimization*) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang paling diinginkan diantara kriteria efektivitas atau dengan kata lain upaya untuk memaksimalkan sumber-sumber yang telah dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Sidik (2001:8) berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/ kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Otonomi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2008:800) otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi (*autonomy*) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. *Auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Menurut Bastian (2006:338) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Gadjong (2007:109) "otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintah di daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) menuliskan, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah diatas mencerminkan adanya desentralisasi, sebagaimana isi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 7 "desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Bastian (2006:203) menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut Pasal tersebut adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dan yang dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah daerah. Anggaran yang digunakan untuk membiayai setiap kegiatan di daerah, diperoleh dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh berdasarkan pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain pendapatan daerah yang sah dalam ruang lingkup wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan desentralisasi (Djaenuri, 2012:88). Sugianto (2008:64) Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintahan daerah. PAD memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilainya perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD sangat tergantung pada *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. Menurut Mardiasmo (2010:132) pendapatan asli daerah merupakan keseluruhan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dipergunakan untuk menutupi segala pengeluaran daerah. Halim (2007:94) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

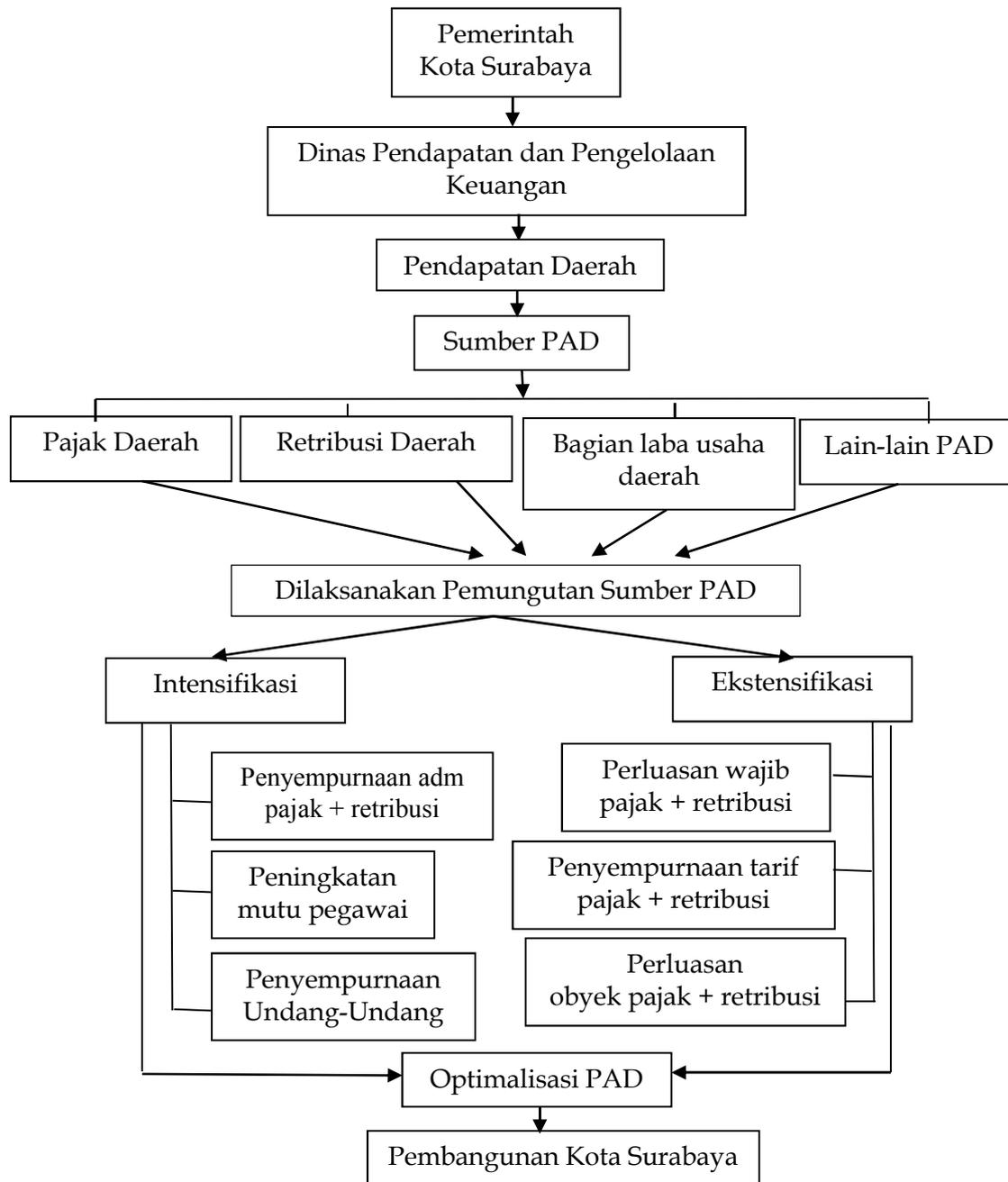
Pembangunan Daerah

Menurut Subandi (2008:133), pembangunan daerah adalah proses yang berjalan antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui pengelolaan potensi dan juga sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah, serta membangun kerjasama dengan sektor swasta sehingga mampu menstimulus perkembangan dari segi pelaksanaan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Pembangunan daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro 2004:63) yaitu: a.) Ketahanan (*sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup, b) Harga diri (*self esteem*): pembangunan haruslah memmanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu, c) *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Asmarani (2010), daerah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global. Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain (Asmarani, 2010): 1) Keadaan daerah, yang meliputi keadaan sosial, politik, budaya, keamanan, fisik daerah dan sarana umum; 2) Rencana pembangunan, yang meliputi tujuan, sasaran, target pembangunan, strategi dan rencana pembangunan; 3) Sarana pembangunan, yang meliputi kelembagaan, dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang tersedia; 4) Pengaruh luar, yang meliputi keadaan sosial, politik, ekonomi, keamanan dunia dan kekuatan yang secara khusus mempengaruhi; 5) Pelaksanaan, meliputi ketentuan-ketentuan serta pengaturan dan pelaksanaan rencana pembangunan.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teoretis serta permasalahan telah dikemukakan, dapat digambarkan dalam suatu bagan seperti yang tersaji pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Obyek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bungin (2008:6) penelitian ini dikatakan kualitatif karena bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan keadaan atau fenomena dilapangan berdasarkan data yang telah terkumpul yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris dilapangan. Alasan digunakan penelitian kualitatif adalah: 1) Kesimpulan tidak

dapat digeneralisasikan karena penelitian tidak menggunakan sampel tetapi dengan penelitian tunggal, 2) Tidak bertujuan menguji hipotesis

Adapun obyek penelitian pada penulisan ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Jimerto No. 25-27 Surabaya. Penelitian ini telah dilakukan di Kota Surabaya dengan mengambil data di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), dengan pertimbangan antara lain adalah 1) Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka keuangan daerah merupakan faktor yang paling penting, 2) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) merupakan salah satu dinas penghasil yang ada di Kota Surabaya, yang memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian data adalah hal terpenting, karena dari data yang diperoleh maka variabel apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat diukur dan disimpulkan. Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Dalam penelitian tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pembangunan Kota Surabaya, metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 1) Wawancara, 2) Observasi dan 3) Dokumentasi

Satuan Kajian

Satuan kajian (*unit of analysis*) adalah merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Adapun definisi satuan kajian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasil guna dan berdaya guna, 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah, dimana pemungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) Pembangunan daerah adalah proses yang berjalan antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui pengelolaan potensi dan juga sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah, serta membangun kerjasama dengan sektor swasta sehingga mampu menstimulus perkembangan dari segi pelaksanaan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif* dengan analisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan serangkaian observasi dimana setiap observasi yang terdapat pada sampel atau populasi tergolong pada salah satu dari kelas-kelas yang eksklusif secara bersama-sama (*mutual exclusive*) dan kemungkinan tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka (Soeratno dan Arsyad, 2008:7). Langkah-langkah analisis data yang dilakukan sebagai berikut: 1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pembangunan Kota Surabaya, 2) Menganalisis target dan realisasi PAD beserta alokasi dana untuk pembangunan Kota Surabaya, 3) Menghitung persentase (%) PAD terhadap besarnya alokasi pembangunan Kota Surabaya, 4) Menginterpretasikan kontribusi PAD terhadap pembangunan Kota Surabaya, 5) Memberikan simpulan

ANALISIS DAN PEMBAHASAN**Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2013-2015**

Dengan diterapkannya otonomi, daerah dituntut untuk dapat membiayai pembiayaan otonomi daerah. Pada prinsipnya sumber pendanaan di daerah itu merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hubungan keuangan pusat-daerah dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, penulis memperoleh data-data sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 s/d 2015

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Ket.
1	Tahun 2013				
	Jumlah PAD	2,657,109,126,595.00	2,791,580,050,709.51	105.06	Optimal Tidak
	Jumlah Pend. Transfer	2,598,043,013,649.00	2,443,713,666,204.00	94.06	Optimal
	Jumlah Lain-Lain Pend. yang sah	91,913,000.00	-		
	Jumlah PAD	5,255,244,053,244.00	5,235,293,716,913.51	99.62	Tidak Optimal
2	Tahun 2014				
	Jumlah PAD	3,247,459,154,137	3,307,323,863,978	101.84	Optimal Tidak
	Jumlah Pend. Transfer	2,879,105,797,765	2,721,487,993,061	94.53	Optimal
	Jumlah Lain-Lain Pend. yang sah	23,629,261,000	23,629,261,000	100.00	Optimal
	Jumlah PAD	6,150,194,212,902	6,052,441,118,039	98.41	Tidak Optimal
3	Tahun 2015				
	Jumlah PAD	3,783,647,234,297	4,035,649,478,398	106.66	Optimal Tidak
	Jumlah Pend. Transfer	2,834,807,600,077	2,558,578,800,539	90.26	Optimal
	Jumlah Lain-Lain Pend. yang sah	24,802,882,000	24,802,882,000	100.00	Optimal
	Jumlah PAD	6,643,257,716,374	6,619,031,160,937	99.64	Tidak Optimal

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Tahun 2013-2015

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa besarnya APBD Kota Surabaya selama tahun 2013-2015 menunjukkan peningkatan sumber pendapatan daerah kota Surabaya terbesar dari PAD, dimana pada tahun 2013 realisasi PAD sebesar Rp. 2,791,580,050,709.51 atau sebesar 105,06%, tahun 2014 sebesar Rp 3,307,323,863,978 atau sebesar 101,84% dan ditahun 2015 sebesar Rp 4,035,649,478,398 atau sebesar 106,66%, sedang dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat pada tahun 2013 sebesar Rp 2,443,713,666,204.- atau sebesar 94.06%, tahun 2014 sebesar Rp 2,721,487,993,061 atau sebesar 94.53%, dan tahun 2015 sebesar Rp 2,558,578,800,539 atau sebesar 90.26%.

Dilihat dari segi realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya pada tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan yang signifikan, hal itu dikarenakan realisasi PAD yang diterima melebihi anggaran yang ditetapkan, namun pendapatan dana transfer selama tahun 2013-2015 realisasinya tidak melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Penurunan proporsi dana perimbangan tersebut lebih disebabkan karena kenaikan dari sumber pendapatan asli daerah serta jumlah lain-lain pendapatan yang sah selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pembahasan

Kota Surabaya sebagai bagian dan Propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Surabaya berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Tingkat Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan memperhatikan potensi-potensi pendapatan yang ada dan memperhatikan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan daerah, maka sasaran utama pendapatan daerah dengan cara meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi atas berbagai sumber dan potensi penerimaan yang ada. Secara umum Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada Tahun 2013-2015 mengalami peningkatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Agus Faizal Seksi bagian Kas dan Akuntansi, beliau mengatakan:

Sumber-sumber lain pendapatan yang sah dapat berasal dari usaha daerah yang sah yang dapat diperoleh secara sah selain pendapatan sebagaimana dikategorikan seperti sumbangan pihak ketiga. Sumber-sumber pendapatan tersebut dapat dikembangkan baik secara intensif maupun secara ekstensif guna meningkatkan pendapatan daerah. Pengembangan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah sangat tergantung kepada kemampuan daerah dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh daerah sendiri (Wawancara Tgl 10 Desember 2016)

Berikut ini penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2013-2015 tersaji pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya
Tahun 2013 s/d 2015
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Target	Realisasi	(%)	Ket
1	Tahun 2013				
	Pendapatan pajak daerah	2,118,292,666,000	2,154,652,323,797.88	101.72	Optimal
	Pendapatan retribusi daerah	235,196,801,853	229,680,153,171.85	97.65	Tidak optimal
	Pendapatan hasil Pengelolaan	111,966,578,336	111,967,697,968.77	100.00	Optimal
	Lain-lain PAD yang sah	191,653,080,406	295,279,875,771.01	154.07	Optimal
	Jumlah PAD	2,657,109,126,595	2,791,580,050,709.51	105.06	Optimal
2	Tahun 2014				
	Pendapatan pajak daerah	2,471,025,909,302	2,427,647,860,148	98.24	Tidak optimal
	Pendapatan retribusi daerah	285,197,286,889	270,112,725,497	94.71	Tidak optimal
	Pendapatan hasil Pengelolaan	120,855,713,722	120,856,635,210	100.00	Optimal
	Lain-lain PAD yang sah	370,380,244,224	488,706,643,123	131.95	Optimal
	Jumlah PAD	3,247,459,154,137	3,307,323,863,978	101.84	Optimal
3	Tahun 2015				
	Pendapatan pajak daerah	2,679,368,000,000	2,738,899,424,558	102.22	Optimal
	Pendapatan retribusi daerah	449,613,176,717	537,319,752,463	119.51	Optimal
	Pendapatan hasil Pengelolaan	135,637,837,123	135,324,221,731	99.77	Tidak optimal
	Lain-lain PAD yang sah	518,026,220,457	624,106,079,645	120.48	Optimal
	Jumlah PAD	3,782,645,234,297	4,035,649,478,397	106.69	Optimal

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Tahun 2013-2015

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa selama tahun 2013-2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu tercapai diatas anggaran yang telah dianggarkan. Besarnya PAD yang didapatkan Pemerintah Kota Surabaya mencapai 105,06% dari realisasi pada tahun 2013 sebesar Rp 2,791,580,050,709.51 sedangkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2,657,109,126,595. Pada tahun 2014 besarnya PAD mencapai 101,84% dari realisasi sebesar Rp 3,307,323,863,978 sedang anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3,247,459,154,137 dan tahun 2015 PAD yang diperoleh mencapai 106,69% dari realisasi sebesar Rp 4,035,649,478,397 sedang anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3,782,645,234,297,- Adanya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2013-2015 tidak terlepas dari usaha Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi salah satunya dengan adanya dukungan prasarana dan sumber daya manusia serta penyiapan penanganan pajak yang handal dan transparan sehingga tahun 2013-2015 realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah mengalami peningkatan.

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari peran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui: (a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber penerimaan daerah lainnya yang sah, (b) Peningkatan ketaatan dan kesadaran

masyarakat dalam membayar pajak, (c) Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial, (d) Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah, dan (e) Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah.

Besarnya pencapaian tiap-tiap komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Pencapaian Komponen Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2013-2015
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi	Pencapaian (%)
1	Tahun 2013		
	Pendapatan pajak daerah	2,154,652,323,797.88	77.18
	Pendapatan retribusi daerah	229,680,153,171.85	8.23
	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	111,967,697,968.77	4.01
	Lain-lain PAD yang sah	295,279,875,771.01	10.58
	Jumlah PAD	2,791,580,050,709.51	100.00
2	Tahun 2014		
	Pendapatan pajak daerah	2,427,647,860,148	73.40
	Pendapatan retribusi daerah	270,112,725,497	8.17
	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	120,856,635,210	3.65
	Lain-lain PAD yang sah	488,706,643,123	14.78
	Jumlah PAD	3,307,323,863,978	10.00
3	Tahun 2015		
	Pendapatan pajak daerah	2,738,899,424,558	67.87
	Pendapatan retribusi daerah	537,319,752,463	13.31
	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	135,324,221,731	3.35
	Lain-lain PAD yang sah	624,106,079,645	15.46
	Jumlah PAD	4,035,649,478,397	100.00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Tahun 2013-2015

Berdasar Tabel 3, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar selama tiga tahun terakhir dapat 2013-2015, dimana kontribusi dari pajak daerah Pada tahun 2013 sebesar 77,18%, pada tahun 2014 meningkat sebesar 73,40 % ditahun 2015 mengalami penurunan sehingga kontribusi menjadi 67,87%. Retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah pajak daerah. Selama tahun 2013-2015 kontribusi retribusi daerah pada tahun 2013 sebesar 8,23%, pada tahun 2014 kontribusi dari retribusi daerah sebesar 8,17%, sedangkan retribusi daerah pada tahun 2015 meningkat menjadi 13,31% Hasil perusahaan dan pengelolaannya memberikan kontribusi sebesar 4,01% tahun 2013, tahun 2014 sebesar 3,65% dan tahun 2015 sebesar 3,35% begitu pula dengan Lain-Lain PAD yang Sah juga memberikan kontribusi yang relatif besar yaitu 10,58% tahun 2013, 14,78% pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 15,46%, Pajak daerah, lain-lain PAD yang sah serta retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang

sebagaimana juga diutarakan oleh Bapak Agus Faizal Bagian Kas dan Keuangan Seksi Akuntansi sebagai berikut:

"Dengan adanya pajak daerah, Lain-lain PAD yang sah maupun retribusi yang memberikan kontribusi yang sangat dominan sekali terhadap total pendapatan asli daerah, ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya di dalam menyelenggarakan otonomi daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat. Dan ini juga mengidentifikasi bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah mampu dan efektif untuk meningkatkan kemampuan keuangannya melalui sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah tersebut dan juga ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah sudah dapat digali secara optimal." (Wawancara Tgl 11 Desember 2016).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal dan tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya adalah pajak daerah memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Faizal Bagian Kas dan Keuangan Seksi Akuntansi beliau mengatakan bahwa:

"Secara pokok sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan. Penentuan target pemungutan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah ditentukan oleh dinas-dinas atau unit pengelolaannya berdasarkan potensi dan pengalaman perkiraan tahun sebelumnya". (Wawancara Tgl 11 Desember 2016).

Salah satu sumber dalam rangka pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut: 1) Dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, salah satu syarat yang diperlukan adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan dari dalam sendiri yaitu berupa dana perimbangan juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah, maka sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus ditingkatkan agar kemandirian dan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan, 3) Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan, sehingga setiap pungutan pendapatan asli daerah perlu diadakan penilaian sesuai kriteria penerimaan seperti kriteria hasil dan elastisitas, keadilan, efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakannya dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Tingkat Pembangunan Daerah Kota Surabaya

Pembangunan Kota Surabaya tergantung dari APBD yang akan di susun dan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Melihat struktur anggaran, dimana pada bagian pendapatan memiliki korelasi dengan pengelolaan pendapatan asli daerah serta kekayaan daerah yang dimiliki, maka pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Pembangunan Daerah Kota Surabaya diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan

dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya tingkat pembangunan daerah terkait dengan belanja daerah Kota Surabaya selama tahun 2013-2015 tersaji pada Tabel 4 berikut ini

Tabel 4
Tingkat Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2013 s/d 2015

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1	Tahun 2013				
	Belanja Operasi	4,192,882,705,877	3,770,796,965,236	89.93	Belum
	Belanja Modal	1,747,356,759,354	1,281,394,616,149	73.33	Maksimal
	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	-	-	
	Jumlah Belanja	5,950,239,465,231	5,052,191,581,385	84.91	
2	Tahun 2014				
	Belanja Operasi	5,050,929,597,673	4,303,012,040,633	85.19	Belum
	Belanja Modal	2,010,585,827,631	1,404,366,425,421	69.85	Maksimal
	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	-	-	
	Jumlah Belanja	7,071,515,425,304	5,707,378,466,054	80.71	
3	Tahun 2015				
	Belanja Operasi	5,428,462,664,366	4,705,234,504,032	86.68	Belum
	Belanja Modal	2,486,345,703,617	1,785,125,255,500	71.80	Maksimal
	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	-	-	
	Jumlah Belanja	7,924,808,367,983	6,490,359,759,532	81.90	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Tahun 2013-2015

Berdasarkan Tabel 4 Belanja Operasi Kota Surabaya selama tahun 2013-2015 berfluktuatif dengan tahun 2014, pada 2013 Belanja Operasi sebesar 89,93%, pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 85,19% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp 86,68%. Sedang Belanja Modal juga berfluktuatif, pada tahun 2013 Belanja Modal sebesar 73,33%, pada tahun 2014 Belanja Modal menurut menjadi sebesar 69,85% dan pada tahun 2015 Belanja Modal meningkat menjadi sebesar 71,80%. Dengan demikian Belanja Operasi lebih besar dari Belanja Modal.

Pemerintah Kota Surabaya masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya pengeluaran dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal,

sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota Surabaya atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Surabaya diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Peran Pembangunan Kota Surabaya

Perkembangan pembangunan Kota Surabaya yang sangat cepat, baik secara social ekonomi maupun perwujudannya dalam bentuk fisik menuntut adanya aturan tata ruang yang merupakan pedoman dalam mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan kota. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu didalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan serta pengembangan lingkungan hidup kota guna terwujudnya suatu kehidupan dan penghidupan kota yang aman, tertib, lancar dan sehat. Pembangunan kota Surabaya akan terus dimaksimalkan guna menciptakan peluang yang ada. Tidak hanya pembangunan infrastruktur di tengah kota yang terus dikebut, namun juga kawasan pinggiran. Ini agar tercipta pemerataan pembangunan. Beberapa pembangunan kota Surabaya yang sudah selesai maupun yang akan dilaksanakan tersaji pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Jenis Pembangunan Kota Surabaya

No	Jenis Pembangunan	Anggaran	Keterangan
1	<i>Underpass</i> (Jalan Bawah Tanah)	Rp 72 Milyar	Sudah mulai dikerjakan
2	Jalan Dengan <i>Box Culvert</i>	Rp 190 Milyar	Baru sekitar 75% selesai pekerjaannya
3	Jembatan Kenjeran Surabaya	Rp 200 Milyar	Sudah diresmikan Walikota Surabaya ibu Ir. Tri Rismaharini, MT, 9 Juli 2016
4	<i>Frontage Road</i> (FR) Sisi Timur dan Sisi Barat	Rp 270 Milyar	Pembangunan FR Sisi Timur sudah selesai. FR Sisi Barat belum selesai
5	Jalur Luar Lingkar Barat (JLLB) dan Jalur Luar Lingkar Timur (JLLT)	Rp 314 Milyar	Proses pengerjaan, serta pembebasan lahan mencapai 80%

Sumber: Bapekko Kota Surabaya (Diolah)

Upaya-Upaya untuk Mengoptimisasi Pendapatan Asli Daerah

Berkaitan dengan upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya menurut Bapak Agus Faizal Bagian Kas dan Keuangan Seksi Akuntansi sudah cukup baik hal tersebut dapat diketahui dari: 1) Pemerintah kota sudah mengefektifkan sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan, 2) Pemerintah kota sudah mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk operasional dilapangan 3) Pemerintah kota sudah mengupayakan tidak adanya birokrasi terhadap pelayanan pemungutan pajak daerah, 4) Pemerintah kota mengupayakan tersedianya pelayanan yang prima terhadap masyarakat dalam pemungutan pajak, 5) Pemerintah kota sudah mengefektifkan pemberlakuan sanksi bagi penunggak pajak.

Dan sama halnya yang diujarkan oleh Bapak Agus Faizal Bagian Kas dan Keuangan Seksi Akuntansi, bahwa:

Dalam merealisasikan penerimaan terhadap target pendapatan yang telah ditetapkan, akan diupayakan semaksimal mungkin terhadap pajak daerah dan

retribusi daerah, dengan melakukan: menggali potensi wajib pajak baru, meningkatkan kualitas pendataan, meningkatkan intensitas penagihan dan mengoptimalkan pengawasan dilapangan dalam pelaksanaan pemungutan. (Wawancara Tgl 11 Desember 2016).

Maka selanjutnya akan dijelaskan Berkaitan dengan efektivitas pemungutan pajak daerah daerah dan retribusi daerah, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Faizal Bagian Kas dan Keuangan Seksi Akuntansi, beliau mengatakan bahwa:

"Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui efektivitas pemungutannya perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek pajak atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang (Wawancara Tgl 11 Desember 2016).

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Faktor pendukung intensifikasi dan ekstensifikasi di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: a) Sistem jemput bola dalam arti petugas melakukan penagihan terhadap penungga pembayaran pajak, b) Memberikan surat peringatan terhadap para penunggak wajib pajak, c) Memberikan informasi terkait kemudahan pembayaran pajak melalui UPTD terdekat, d) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat secara terpadu agar peningkatan kesadaran wajib pungut (WP) melalui penyuluhan secara terpadu agar dapat meningkatkan penerimaan daerah, e) Peningkatan skill sumber daya manusia melalui pelatihan, penataran, kursus-kursus dan sejenisnya khususnya dalam bidang keuangan, f) Peningkatan sarana transportasi berupa mobil untuk menunjang intensifikasi pelaksanaan pungutan.

Faktor penghambat intensifikasi dan ekstensifikasi di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: a) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran. Terkait mekanisme atau prosedur pembayaran pajak masyarakat merasa kesulitan karena kurangnya informasi atau tidak tersedianya *reseption* (tempat informasi), b) Belum mampu menetapkan sanksi. Besarnya denda yang ditetapkan kurang tepat terkait dengan besarnya nominalnya yang ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang berkaitan optimlaisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap pembangunan Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Diantara empat sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, yang paling besar kontribusinya terhadap PAD Kota Surabaya adalah dari sektor pajak daerah, 2) Pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih besar bila dibandingkan dengan ketiga komponen yang lain terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karenanya kemampuan melaksanakan pemungutan pajak daerah dan tiga komponen PAD lainnya dapat diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh pajak daerah dan tiga komponen lainnya terhadap PAD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD berarti semakin baik pelaksanaan pemungutan pajak daerah, 3) Selama tahun 2013-

2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan memenuhi anggaran. Adanya peningkatan realisasi PAD selama tahun 2013-2015 tidak terlepas dari usaha Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, 4) Faktor-faktor pendukung terkait dengan optimalisasi PAD adalah: (a) Sistem jemput bola dalam arti petugas melakukan penagihan terhadap penungga pembayaran pajak, (b) Memberikan surat peringatan terhadap para penunggak wajib pajak, (c) Memberikan informasi terkait kemudahan pembayaran pajak melalui UPTD terdekat, (d) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, 6) Faktor-faktor penghambat terkait dengan optimalisasi PAD adalah: (a) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran, (b) Belum mampu menetapkan sanksi, 6) Tingkatkan Pembangunan Kota Surabaya selama ini dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjang dari PAD yang dihasilkan selalu melebihi anggaran yang si tetapkan.

Saran

Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk menekankan peningkatan komponen PAD dibandingkan komponen lainnya sehingga diharapkan dapat memperkuat kemandirian Pemerintah Kota tersebut dalam memacu pertumbuhan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah guna mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Kota Surabaya perlu menghitung secara cermat berapa besarnya pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak karena meskipun pemerintah Kota Surabaya berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebih besar dari realisasi pendapatan yang diterimanya.

Pajak daerah dan Lain-lain PAD yang sah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah harus terus ditingkatkan lagi karena memiliki potensi yang baik dimasa mendatang. Oleh karena itu penerimaan pajak daerah dan Lain-lain PAD yang sah nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan pembangunan fisik, agar tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, harus cepat tanggap dan responsif. Pemerintah Kota harus lebih memaksimalkan fungsi pengawasan dengan struktural instansi dibawahnya hingga kelurahan serta menjalankan fungsi kontrol dengan baik agar aspirasi masyarakat dapat benar benar terserap. Jalan merupakan urat nadi utama penggerak perokonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, A. D. 2010. Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis SWOT Dan AHP. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bungin, B. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Yogyakarta.
- Darmanto, A. 2016. Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*. Vol. 4 (1): 15-25.
- Depdikbud. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Djaenuri, A.. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat - Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Gadjong, A. A. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Gibson, Ivanevich dan Donnely. 2004. *Organisasi dan Manajemen*. Erlangga. Jakarta.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sidik. A. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soeratno dan L. Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Subandi. 2008. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Sekolah Pasca Sarjana UGM. Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Sunarno, S. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Wardhono, A. Y. Indrawati., dan C. Q. Qori`ah. 2012. *Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember*. *JATI Undip*. Vol 7(2): 69-77.